

Latar Belakang Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional. Namun pada masa sekarang ini pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli lebih cenderung berkurang jika dibandingkan pada masa dimana belum dibukanya pasar-pasar modern atau supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional. Perbandingan ini dipengaruhi karena pasar modern memiliki fasilitas pelayanan yang baik, tempat lebih nyaman dan ketertiban yang dijamin jika dibandingkan berbelanja dipasar tradisional yang cenderung panas, berdesak-desakan dan tempat atau lokasi yang kurang memadai. Pasar tradisional memiliki posisi khusus di dalam Pemerintahan Indonesia, karena keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat. Ketergantungan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional membuat pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakannya. Pasar tradisional memiliki keunggulan yang berbeda dengan pasar modern. Keunggulan yang dimiliki pasar tradisional yaitu memiliki area yang luas, harga yang rendah, sistem tawar menawar harga barang antara penjual dan pembeli yang akan menimbulkan keakraban. Konsumen yang cenderung berbelanja di pasar tradisional karena harga di pasar tradisional bisa ditawarkan, harganya murah, dilayani langsung, serta berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2 Makassar merupakan daerah yang kini disebut sebagai salah satu wilayah strategis ekonomi ASEAN. Kota dengan luas wilayah 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, disebut sebagai kutub pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan (Sulsel), peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 33,12%.¹ Hal ini tentunya dapat menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia yang unggul dalam hal membangun pusat perbelanjaannya. Perubahan pusat perbelanjaan yang modern tentunya telah dilakukan untuk menambah daya tarik konsumen di Kota Makassar. Perubahan tersebut terjadi dengan adanya pembangunan minimarket dan pasar modern yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri masyarakat. Hal ini justru dapat pula berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonomi rendah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangannya yang tidak terlalu banyak. Hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memang memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung biasanya merugikan pihak lain. Persoalan ini harus mendapat penyelesaian yang akan menguntungkan semua pihak. Pemerintah Kota Makassar menyadari pemberdayaan pasar tradisional dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah membuat seperangkat peraturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di 1 Mediatama. “Wilayah Strategis Di Ekonomi ASEAN”. 18 Juli 2017. (<http://mediatamabinakreasi.com/makassar-sebagai-satu-wilayah-strategis-di-ekonomi-asean/>)

3 Kota Makassar. Perda ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasar-pasar tradisional di Kota Makassar.² Menurut Easton (dalam Suaib 2016:xvi) mengenai kebijakan publik ialah : “Kebijakan publik merupakan alokasi nilai yang otoratif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoratif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.”³ Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) “Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang”. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan

berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar lahir sebagai bentuk kebijakan publik yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat khususnya bagi pelaku-pelaku yang berkecimpung di pasar tradisional di Kota Makassar. 2 Perda No.15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar. 3 Suaib. 2016. Kebijakan Publik. Dari Administrasi Negara, kebijakan publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis, hal. xvi. 4 Pegelolaan pasar tradisional sendiri dianggap belum berkembang pengelolaannya. Yang mana masih tradisional yang mengakibatkan sulit berkembangnya pasar, dan toko modern yang terus berkembang menuntut pasar tradisional harus bertahan didalam persaingan. Kondisi pasar yang kotor, tak tertata dan kumuh menyebabkan konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional. Pedagang-pedagang kurang memperhatikan kebersihan dan tatanan dagangannya. Maka dari itu, peran pemerintah sebagai fasilitator perlu melakukan langkahlangkah untuk memberdayakan pasar tradisional. Pemerintah Kota Makassar yang di dalamnya terdapat berbagai Satuan Kerja Perangkat Dinas memiliki kewenangan dan tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini. Sesuai dengan amanat dari Undang Undang No. 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai Perundang-undangan yang dihasilkan. Menarik untuk dicermati bahwa Perda Nomor 15 ini, semenjak diterbitkannya hampir belum mempunyai dampak positif terhadap eksistensi pasar tradisional dan UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah). Melihat fenomena yang terjadi, ekspansi pasar modern di Kota Makassar justru semakin tidak terkendali. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang dikeluarkan lembaga Nielsen, dimana sepanjang tahun 2010 pertumbuhan minimarket meningkat 42 % menjadi 16.922 unit dibanding sebelumnya sebesar 11.927 unit.⁴ Contoh kasusnya pembukaan gerai-gerai minimarket baru seperti Alfamart, Indomaret, Alfa Midi dan Alfa Express juga turut berperan dalam marginalisasi pasar lokal. Khusus untuk Alfamart, saat ini sudah membuka kurang 4 Tribun Timur. “Pengelolaan Pasar Tradisional Di Makassar”. 18 Juli 2017. (<http://makassar.tribunnews.com/2013/12/20/2014-pengelolaan-pasar-tradisional-di-kotamakassar/>) 5 lebih 60 gerai.⁵ Selain contoh tersebut di atas, ada beberapa contoh kasus lagi mengenai ekspansi pasar modern (supermarket, dll) yang semakin mengikis eksistensi pasar traditional di Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menganggap bahwa uraian di atas menjadi bahan untuk penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Terong)”.

KESIMPULAN Berdasarkan data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : implementasikan Perda No.15 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Makassar terkhusus di Pasar Terong secara garis besar belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan, kondisi pasar yang belum sepenuhnya tertata rapi serta gedung pasar yang seakan terkikis oleh moderenisasi zaman, apalagi bentuk gedung yang semakin kusam. Selain itu, Aturan dalam Perda yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai pemberdayaan dan Perlindungan pasar lokal.